

**KOLABORASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Muhammad Faudy Pratama  
NPP.29.1090

Asdaf Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah  
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 29.1090@praja.ipdn.ac.id

**ABSTRACT (in english)**

**Problem/Background (GAP):** Forest and land fires still score annually and become a national issue that deserves serious attention from the government and all levels of government. Collaboration between the government, the private sector, the community and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is an unbroken link for forest and land fires. **Objective:** This study aims to determine the collaboration of BPBD, obstacles and efforts in forest and land fires in East Barito Regency. **Methods:** This study used a descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out by interviewing, as well as documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Results/Findings:** The results of the study show that in the process of implementing collaboration there are many obstacles, starting from the infrastructure owned by the Regional Disaster Management Agency and the very small number of field personnel so that collaboration with other agencies is very much needed. This collaboration in forest and land fires involves the East Barito POLRES from the police which often hold joint activities in it. **Conclusion:** The collaboration carried out by the Disaster Management Agency in carrying out forest and land fires is already up and running.

**Keywords:** Collaborative Governance, forest and land fires, Regional Disaster Management Agency

**ABSTRAK (in bahasa)**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kebakaran hutan dan lahan masih mencetak angka setiap tahunnya dan menjadi isu nasional yang layak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan semua lini pemerintahan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) merupakan mata rantai yang tidak terputus guna menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi BPBD, hambatan dan upaya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten

Barito Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kolaborasi terdapat banyak kendala mulai dari sarana prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan jumlah personil lapangan yang sangat sedikit sehingga membuat kolaborasi dengan instansi lain sangat dibutuhkan. Kolaborasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini melibatkan POLRES Barito Timur dari pihak Kepolisian yang dimana sering dilakukannya kegiatan-kegiatan bersama yang di dalamnya. **Kesimpulan:** Kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sudah ada dan berjalan. **Kata kunci:** *Collaborative Governance*, kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan hutan di Indonesia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Karena jika pemanfaatannya tidak tepat akan berdampak kepada kesejahteraan yang akan menurun dan akan menjadi suatu kerusakan ekosistem yang mempunyai dampak sangat buruk bagi manusia dan salah satu nya kerusakan hutan yang terjadi adalah kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hamper 99% diakibatkan oleh kegiatan manusia baik di segaja maupun tidak, dari angka presentase tersebut, kegiatan konversi lahan menyumbang 34%, peladangan liar 25%, pertanian 17%, kecemburuan sosial 14%, proyek transmigrasi 8%, sedangkan hanya 1% yang di sebabkan oleh alam. Berbagai provinsi di wilayah Indonesia pasti memiliki permasalahan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki (Darwiati & Tuheteru, 2010). Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di setiap wilayah di Kalimantan. Hutan memang memiliki peran penting dalam ekosistem dan lingkungan hidup akan tetapi keberadaan hutan di Kalimantan mulai terancam akibat dari pembukaan hutan yang tidak terkendali dan banyak nya di alih fungsi kan hutan sebagai tempat untuk ditanami jenis tanaman tertentu guna mendapatkan keuntungan. Pada setiap tahun terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia dimana beberapa wilayah memiliki tingkat kasus dan luas kebakaran hutan dan lahan yang berbeda beda.

Pada tahun 2019 merupakan kebakaran hutan dan lahan cukup parah yang membakar seluas 317,749,00 ha hutan dan lahan. Kalimantan Tengah memiliki total luas hutan yang cukup besar yaitu 12.697.165,00 ha dan terbagi di 14 Kabupaten/Kota dan salah satunya merupakan Kabupaten Barito Timur yang memiliki total luas 85.033.52 ha hutan (BPS, 2021).

Pada tahun 2019 dimana terjadi kasus kebakaran hutan yang cukup besar yang terjadi di Kalimantan Tengah yang menyebabkan terjadi nya kasus kebakaran hutan di tiap-tiap Kabupaten/kota salah satu nya Kabupaten Barito Timur yang memiliki tingkat kebakaran hutan cukup rendah di dibandingkan dengan Kabupaten lainnya pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

Diketahui bahwa pada tahun 2019 terjadi kasus kebakaran yang sangat besar dan terjadi di setiap Kabupaten/Kota yang berada di Kalimantan Tengah seluas 7.994 hektar lahan dan hutan yang terbakar. Kabupaten Barito timur pada tahun 2019 menjadi salah satu wilayah dengan kebakaran hutan dan lahan yang sangat sedikit dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang dimana hanya terdapat 4 kasus kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi dengan total luas wilayah yang terbakar seluas 13 hektar, dibandingkan dengan wilayah lainnya yang dimana kasus kebakaran hutan dan lahan mulai dari 27 hingga 825 kasus.

Dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan upaya pemerintah daerah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak berjalan sendiri melainkan harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait dan melibatkan masyarakat untuk membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi apabila curah hujan yang sangat sedikit yang biasa terjadi pada musim kemarau panjang sehingga menyebabkan timbulnya titik-titik panas (*hotspot*). Selain melakukan kolaborasi pemerintah daerah juga mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah no.1 tahun 2020, hal ini dilakukan agar menekan angka terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pemerintah daerah dalam mencegah pemerintah daerah sudah melakukan berbagai macam upaya pencegahan dari sosialisasi, penentuan titik rawan kebakaran dan larangan untuk membuka lahan dengan membakar namun upaya yang dilakukan ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Karena pemerintahlah yang dijadikan titik tumpu untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, padahal seharusnya semua pihak turut bertanggung jawab bersama melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja atau organisasi tertentu, pemerintah menjadi pihak dominan yang disalahkan karena dianggap tidak tanggap dan kurang tegas sehingga kebakaran hutan dan lahan masih terjadi, terkendalanya masalah keterbatasan sarana dan prasarana serta tenaga yang dibutuhkan dan infrastruktur dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilapangan.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Agar hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dapat terjalin serta secara bersama sama melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sehingga dilakukannya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar tujuan dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan tersebut dapat tercapai. Mengingat bahwa kolaborasi itu sendiri merupakan upaya bersama yang melibatkan pihak yang lebih luas dibandingkan dengan koordinasi. Namun, agar kolaborasi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya maka harus melalui proses proses yang tepat terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian Tri Maylani dan Dadaf Mashur

(2018) yang berjudul *Collaborative governance* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut. Menemukan bahwa Kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi dan dianggap penting sehingga menjadi perhatian pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melibatkan berbagai pihak seperti sektor swasta dan masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan gambut yang disebut *collaborative governance*. Kedua, penelitian Dwi Agustina (2019) yang berjudul Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menemukan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan bencana di DIY saat ini telah dilakukan oleh berbagai multi aktor secara kolaboratif. Masing-masing aktor telah di bagibagi perannya sesuai dengan keahlian masing-masing. Ketiga, penelitian Perdana, dkk (2021) yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 *Command Center*. Menemukan bahwa bahwa pola hubungan yang dilakukan antara kedua lembaga tersebut dilakukan melalui pembentukan posko dukungan yang sejatinya memiliki 3 fungsi utama yakni cipta kondisi, dekontaminasi dan pemulasaran jenazah Covid-19. *Collaborative Governance* antara Muhammadiyah *Covid Command Center* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dengan BPBD DIY menunjukkan intensitas yang baik dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19. Kesimpulan yang didapat bahwasannya pola kolaborasi yang dilakukan ini cenderung efektif mengingat penanganan lapangan membutuhkan suatu tindakan cepat dengan dukungan sumber daya yang mencukupi yang dipenuhi melalui interaksi antar sektor.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda dengan lokus pad Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi BPBD, hambatan dan upaya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Creswell, 2016:3). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan narasumber dari Kepala BPBD Kabupaten Barito Timur (1 orang), Sekretaris BPBD Kabupaten Barito Timur (1 orang), Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan (1 orang), Kabid Pemadam Kebakaran (1 orang), Kasi Pencegahan dan Kesiap Siagaan (1 orang), Kasubag umum dan kepegawaian (1 orang), Manajer operasional PT. Alam Sukses Lestari (1 orang), Masyarakat Peduli Api (5 orang). Teknis analisis

data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Permasalahan dibahas menggunakan teori Ansl dan Gash dengan dimensi dialog antar muka, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kolaborasi BPBD Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Timur**

Peneliti dalam menganalisis peran dalam penelitian ini menggunakan teori Ansl dan Gash dengan dimensi dialog antar muka, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara.

##### **A. Dialog Antar Muka**

Dalam Kolaborasi pemerintahan yang telah di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran terdapat beberapa hal yang dimana dialog tatap muka merupakan cara untuk melakukan diskusi antar instansi dalam rangka membangun kepercayaan bersama. Dalam hal ini membangun kepercayaan bersama dalam proses kolaborasi pemerintahan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sudah melibatkan dari pihak masyarakat yaitu masyarakat peduli api dan untuk pihak ketiga atau swasta di ikuti oleh PT. Alam Sukses lestari.

##### **B. Komitmen Terhadap Proses**

Dalam komitmen terhadap proses kolaborasi pemerintahan Badan Penanguangan Bencana Daerah menentukan perjanjian dalam rangka menentukan tujuan dan arah berjalannya sebuah kolaborasi. Untuk menentukan tujuan maka diperlukan misi yang jelas yang di pahami oleh semua pihak yang tergabung dalam kolaborasi tersebut dan juga keterbukaan dalam hal kekurangan yang dimiliki sehingga dapat diketahui bersama sehingga dapat saling memahami kebergantungan antara masing-masing pihak. Selanjutnya setelah masing masing pihak mengetahui bahwa tidak bisa berdiri sendiri dalam melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan maka akan terbentuk nya kolaborasi yang prosesnya di miliki oleh semua pihak karena sudah terbuka dan bergantung satu dengan lainnya.

##### **C. Pemahaman Bersama Dalam Proses**

Memiliki pandangan atau pemahaman yang sama dalam melakukan kolaborasi adalah salah satu proses yang dimana merupakan langkah-lagkah dalam berjalannya kolaborasi yang baik dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Barito Timur. Dalam memahami proses Kolaborasi Badan Penanggulungan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran terdapat beberapa indikator yang menjelaskan bagaimana proses berjalannya kolaborasi dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barito Timur yaitu dimulai dari penentua devinisi masalah bersama yaitu masalah yang sedang di hadapi ini di rasakan semua pihak dan memerlukan jalan keluar atau pemecahan masalah dalam hal tersebut, dan indentifikasi masalah bersama sehingga saling memahami kekurangan dan kedala masing-masing pihak yang melakukan kolaborasi pemerintahan.

### **3.2. Hambatan BPBD Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Timur**

Kendala yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam proses pelaksanaannya terdapat banyak kendala mulai dari sarana prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan jumlah personil lapangan yang sangat sedikit sehingga membuat kolaborasi dengan instansi lain sangat dibutuhkan kekurangan dana dan kurangnya personil lapangan.

### **3.3. Upaya BPBD Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Barito Timur**

Terdapat upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan kolaborasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan terbentuknya satuan reaksi cepat atau TRC yang dimana satuan ini berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam melakukan tugasnya sehingga ini merupakan upaya yang dilakukan langsung untuk meningkatkan pencegahan kebakaran hutan dan bencana lainnya yang akan terjadi di Kabupaten Barito Timur.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peneliti menemukan bahwa di Terdapat upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan kolaborasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan terbentuknya satuan reaksi cepat atau TRC yang dimana satuan ini berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam melakukan tugasnya. Layaknya temuan yusa Djuyandi (2014) yang menemukan bahwa *Collaborative Governance* antara Muhammadiyah *Covid Command Center* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dengan BPBD DIY menunjukkan intensitas yang baik dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19. Kesimpulan yang didapat bahwasannya pola kolaborasi yang dilakukan ini cenderung efektif mengingat penanganan lapangan membutuhkan suatu tindakan cepat dengan dukungan sumber daya yang mencukupi yang dipenuhi melalui interaksi antar sektor (Perdana dkk, 2021).

Diketahui dalam penelitian bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah menentukan perjanjian dalam rangka menentukan tujuan dan arah berjalannya sebuah kolaborasi. Untuk menentukan tujuan maka diperlukan misi yang jelas yang dipahami oleh semua pihak yang tergabung dalam kolaborasi tersebut dan juga keterbukaan dalam hal kekurangan yang dimiliki sehingga dapat diketahui bersama sehingga dapat saling memahami kebergantungan antara masing-masing pihak. Selanjutnya setelah masing-masing pihak mengetahui bahwa tidak bisa berdiri sendiri dalam melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan maka akan terbentuknya kolaborasi yang prosesnya dimiliki oleh semua pihak karena sudah terbuka dan bergantung satu dengan lainnya. Layaknya temuan Maylani dan Mashur (2018) bahwa pemerintah melibatkan berbagai pihak seperti sektor swasta dan masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan gambut yang disebut *collaborative governance* (Maylani&Mashur, 2018).

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa Kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sudah ada dan berjalan namun dalam porses pelaksanaannya terdapat banyak kendala mulai dari sarana prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan jumlah personil lapangan yang sangat sedikit sehingga membuat kolaborasi dengan instansi lain sangat dibutuhkan. Kolaborasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini melibatkan POLRES Barito Timur dari pihak Kepolisian yang dimana sering dilakukannya kegiatan-kegiatan bersama yang di dalamnya.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ketua BPBD Kabupaten Barito Timur beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT. Pustaka Pelajar.

Darwiati, Wida, and Faisal Danu Tuheteru. “Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Pertumbuhan Vegetasi’.” 3(1) (2010): 27–32.

Mokodompi, Putri Indah Sari, Jeffrey I. Kindangen, and Raymond Ch Tarore. “PERUBAHAN LAHAN PERTANIAN BASAH DI KOTA KOTAMOBAGU.” *Jurnal Spasial* Vol 6. No. (2019): 2.

Syarifah, Hani, Diane Tanti Poli, Miftah Ali, Hayatul Khairul Rahmat, I Dewa Ketut, and Kerta Widana. “KAPABILITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BALIKPAPAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7 no 2 (2020): 398–407. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.

Wiswayana, Wishnu Mahendra, and Ni Komang Desy Arya Pinatih. “Pandemi & Tantangan Ketahanan Nasional Indonesia” 8(2) (n.d.): 5.